

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR), Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO), *Financing to Deposit Ratio* (FDR), dan inflasi Aceh terhadap *Non-Performing Financing* (NPF) pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Provinsi Aceh periode 2020 hingga 2025, baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan hasil pengujian dan pembahasan yang dapat disimpulkan bahwa di antara keempat variabel yang diuji, hanya BOPO yang benar-benar terbukti memengaruhi NPF secara nyata, sedangkan CAR, FDR, dan inflasi Aceh belum mampu menunjukkan pengaruh yang meyakinkan secara statistik meskipun arah hubungannya sebagian besar tetap sejalan dengan dugaan teori. Efisiensi operasional yang tercermin dalam BOPO terbukti menjadi faktor internal yang paling menentukan kualitas pembiayaan BPRS Aceh, karena ketidakefisienan bank dalam mengelola biaya operasional secara langsung menggerus kapasitasnya dalam menjalankan fungsi penyalangan dan pengawasan nasabah, sehingga pembiayaan bermasalah lebih mudah muncul dan berkembang.

Banyaknya variabel yang tidak terbukti signifikan dalam penelitian ini bukan berarti CAR, FDR, dan inflasi Aceh sama sekali tidak relevan bagi kualitas pembiayaan BPRS, melainkan lebih mencerminkan karakteristik khas data dan konteks BPRS Aceh selama periode penelitian. Pengaruh CAR sulit terdeteksi karena hampir seluruh BPRS Aceh berada pada zona permodalan yang sama-sama aman dan jauh di atas batas minimum regulasi, sehingga variasi datanya terlalu sempit untuk membedakan tingkat risiko antar bank, dan pengaruhnya baru tampak jelas ketika modal salah satu bank mendekati batas minimum. Pengaruh FDR juga tidak terkonfirmasi karena volume pembiayaan yang besar ternyata tidak otomatis berisiko. Sementara itu, pengaruh inflasi Aceh tertutup oleh kebijakan restrukturisasi pembiayaan akibat pandemi Covid-19 yang berlaku hingga awal 2024, sehingga lonjakan inflasi pada 2022 tidak serta-merta tercermin pada kenaikan NPF, yang justru baru terjadi pada 2024 hingga 2025 seiring berakhirnya

restrukturisasi dan munculnya bencana banjir Aceh. Meskipun secara parsial hanya BOPO yang berpengaruh nyata, keempat variabel tersebut secara simultan tetap terbukti berpengaruh signifikan terhadap NPF, yang menunjukkan bahwa risiko pembiayaan BPRS Aceh sesungguhnya terbentuk dari kombinasi kondisi permodalan, efisiensi operasional, likuiditas, dan tekanan makroekonomi yang bekerja secara bersamaan, bukan dari satu faktor tunggal saja. Dengan demikian, penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi operasional merupakan kunci utama dalam menjaga kualitas pembiayaan BPRS di Aceh, sementara permodalan, likuiditas, dan inflasi berperan sebagai faktor pelengkap yang pengaruhnya akan semakin terasa terutama pada saat terjadi guncangan besar seperti berakhirnya restrukturisasi Covid-19 dan bencana alam.

5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disampaikan sebagai bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. Pertama, nilai *Adjusted R-squared* sebesar 22,26 persen menunjukkan masih terdapat 77,74 persen variasi NPF yang dijelaskan oleh faktor lain di luar model, sehingga variabel yang digunakan belum menangkap seluruh penyebab pembiayaan bermasalah. Kedua, variabel independen yang digunakan terbatas pada tiga faktor internal dan satu faktor eksternal, sedangkan faktor lain seperti kualitas tata kelola, karakteristik nasabah, atau variabel makroekonomi lain belum dimasukkan ke dalam model. Ketiga, data inflasi yang digunakan bersifat makro dan sama untuk seluruh delapan BPRS pada triwulan yang sama, sehingga variasinya jauh lebih sempit dibandingkan tiga variabel internal lain dan membuat estimasi pengaruhnya kurang akurat. Keempat, objek penelitian terbatas pada delapan BPRS di Provinsi Aceh sehingga hasilnya menggambarkan karakteristik BPRS Aceh dan belum tentu dapat digeneralisasi ke wilayah lain, apalagi beberapa temuan seperti pengaruh CAR ternyata cukup dipengaruhi oleh kondisi satu atau dua bank tertentu dalam sampel. Kelima, pandemi Covid-19 dan bencana banjir Aceh akhir 2025 diperlakukan sebagai konteks yang menjelaskan pergerakan data, bukan sebagai variabel yang diukur langsung dalam model, sehingga pengaruh pastinya terhadap NPF belum dapat dipisahkan secara statistik dari pengaruh CAR, BOPO, FDR, dan inflasi itu sendiri.

5.3 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa saran yang dapat disampaikan mengikuti kerangka manfaat penelitian yang diuraikan pada bagian awal, yaitu aspek teoritis dan aspek praktis.

1. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan di bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai manajemen risiko pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Hasil penelitian ini memperkaya kajian tentang penyebab *Non-Performing Financing* pada BPRS dengan menggabungkan faktor internal dan eksternal dalam satu model, dengan temuan bahwa efisiensi operasional melalui BOPO merupakan faktor yang paling dapat diandalkan untuk menjelaskan naik turunnya NPF. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan menambahkan variabel lain seperti kualitas tata kelola, diversifikasi pembiayaan, ukuran bank, atau variabel makroekonomi regional lainnya agar model dapat menjelaskan variasi NPF dengan lebih baik, serta memperluas objek penelitian ke BPRS di provinsi lain agar hasilnya dapat dibandingkan lebih luas.

2. Aspek Praktis

a. Bagi manajemen BPRS di Provinsi Aceh

Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi manajemen BPRS dalam mengelola faktor internal seperti kecukupan modal, efisiensi operasional, dan likuiditas demi menjaga kualitas pembiayaan. Karena BOPO terbukti menjadi satu-satunya variabel yang berpengaruh signifikan terhadap NPF, manajemen BPRS disarankan memprioritaskan perbaikan efisiensi operasional dengan menekan biaya yang tidak produktif dan memperkuat fungsi analisis kelayakan, pengawasan, serta penagihan pembiayaan. Kecukupan modal dan likuiditas tetap perlu dijaga, tetapi pengelolaannya sebaiknya diarahkan untuk mendukung penguatan fungsi pengawasan pembiayaan, bukan sekadar dijadikan bantalan kerugian semata.

b. Bagi Otoritas Jasa Keuangan

Hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam merumuskan pengawasan dan regulasi yang lebih efektif untuk mengendalikan risiko pembiayaan di industri BPRS. OJK disarankan memperketat pemantauan terhadap BPRS yang memiliki rasio BOPO tinggi, karena efisiensi operasional terbukti berhubungan langsung dengan kualitas pembiayaan, serta menyiapkan skema pendampingan bagi BPRS yang sedang menghadapi tekanan operasional. Selain itu, perlu disiapkan skema mitigasi risiko yang antisipatif terhadap berakhirnya kebijakan restrukturisasi dan terhadap guncangan ekonomi regional seperti bencana alam, agar lonjakan pembiayaan bermasalah dapat diredam sejak awal.

c. Bagi Bank Indonesia

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa inflasi Aceh, meskipun secara statistik belum terbukti berpengaruh signifikan terhadap NPF selama periode penelitian, tetap relevan secara teori, terutama pada saat terjadi guncangan ekonomi seperti bencana banjir akhir 2025. Oleh karena itu, Bank Indonesia disarankan terus menjaga stabilitas inflasi Aceh dalam rentang sasaran nasional, khususnya melalui koordinasi bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Aceh dan Pemerintah Aceh, terutama menjelang dan setelah terjadinya guncangan ekonomi seperti bencana alam yang berpotensi menekan daya beli dan kemampuan bayar nasabah UMKM. Selain itu, mengingat sebagian BPRS di Aceh memiliki FDR yang jauh melampaui batas optimal yang ditetapkan Bank Indonesia dalam PBI Nomor 17/11/PBI/2015, meskipun penelitian ini belum menemukan pengaruh signifikan FDR terhadap NPF, Bank Indonesia perlu tetap memantau risiko likuiditas jangka panjang yang mungkin timbul dari penyaluran pembiayaan yang jauh melampaui dana pihak ketiga yang dihimpun, agar fungsi intermediasi BPRS tetap berjalan sehat sekaligus stabil.

d. Bagi Pemerintah Aceh

Hasil penelitian ini dapat menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Aceh dalam menyusun kebijakan ekonomi yang mendukung stabilitas industri keuangan syariah sekaligus melindungi nasabah BPRS. Karena keterkaitan inflasi dengan NPF cenderung baru muncul saat terjadi guncangan ekonomi besar seperti bencana banjir akhir 2025, Pemerintah Aceh disarankan memperkuat program pemulihan ekonomi dan ketahanan usaha bagi pelaku UMKM yang menjadi mayoritas nasabah BPRS, terutama di wilayah yang rawan bencana. Penguatan stabilitas harga pangan dan penyediaan skema bantuan pemulihan usaha pascabencana dapat membantu menjaga kemampuan bayar nasabah, sehingga kualitas pembiayaan BPRS tetap terjaga.